

SAM FERY BAEHAKI, S.Pd.I., M.Pd



## LAPORAN AKHIR HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

Website : <http://temanggung.bawaslu.go.id>



BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG



@BAWASLUKABTMG

B A W A S L U T E R B U K A P E M I L U T E R P E R C A Y A

# 2021



Jln. Diponegoro No. 28,  
Kab. Temanggung Jawa Tengah  
56212

# LAPORAN AKHIR HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

# 2021

Oleh.

SAM FERY BAEHAKI, S.Pd.I., M.Pd



**BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi atas segala nikmat dan karuniaNya, akhirnya Laporan Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Temanggung tahun 2021 dapat terselesaikan dengan lancar.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat, juga sebagai wujud dari keterbukaan informasi atas kerja-kerja yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung selama ini.

Laporan ini niscaya tidak dapat selesai dengan baik tanpa kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itulah perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia
2. Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
3. Segenap Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung beserta jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung.
5. Segenap pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang sudah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini.

Meskipun kami sudah berusaha menyelesaikan penyusunan Laporan ini sebaik-baiknya, namun kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami menantikan kritik dan saran dari segenap pihak sebagai evaluasi dan menyempurnakan laporan ini dimasa yang akan datang.

Semoga bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Khususnya bagi Bawaslu beserta jajarannya untuk Pemilu dan Pemilihan mendatang yang lebih bersih, berkeadilan dan bermartabat.

Temanggung, 18 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA



ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, S.H

# DAFTAR ISI

COVER .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I .....	7
PENDAHULUAN .....	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Dasar Hukum .....	8
BAB II .....	10
TUGAS DIVISI HUKUM HUMAS, DATA DAN INFORMASI .....	10
BAB III .....	12
SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANAN HUMAS .....	12
A. Sumber Daya Manusia .....	12
B. Sarana dan Prasarana Humas.....	18
BAB IV.....	19
PUBLIKASI PEMBERITAAN DAN MEDIA SOSIAL.....	19
A. Platform Media dan Perkembangannya di Bawaslu Kab. Temanggung .....	19
B. Jenis Konten.....	24
BAB V.....	31
CAPAIAN HUKUM .....	31
Advokasi (Bantuan Hukum) dan Dokumentasi Hukum (JDIH).....	31
A. Advokasi (Bantuan Hukum) .....	31
B. Dokumentasi Hukum.....	32
C. Surat Keputusan.....	33
D. Memorandum of Understanding (MoU) .....	34
E. Analisa Hukum Peraturan Perundang-undangan.....	37
F. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan .....	45

BAB VI.....	52
CAPAIAN DATA DAN INFORMASI.....	52
A. Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi.....	52
B. Teknologi Komunikasi dan Informatika (TIK) .....	53
BAB VII.....	55
PENGHARGAAN YANG DIRAIH.....	56
BAB VIII.....	57
RENCANA KERJA HUKUM, HUMAS DAN DATIN TAHUN 2022 .....	57
BAB IX.....	58
PENUTUP.....	58
<i>Lampiran</i> .....	lix

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah SDM Hukum dan Humas .....	12
Tabel 3.2 Peningkatan Kapasitas yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI.....	13
Tabel 3.3 Peningkatan Kapasitas yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah .....	14
Tabel 3.4 Peningkatan Kapasitas yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung .....	17
Tabel 3.5 Sarana dan Prasarana Humas .....	18
Tabel 4.1 Perkembangan Buletin Suara Bawaslu .....	19
Tabel 4.2 Perkembangan Webiste Bawaslu.....	20
Tabel 4.3 Perkembangan Youtube Bawaslu .....	21
Tabel 4.4 Perkembangan Instagram Bawaslu.....	22
Tabel 4.5 Perkembangan Facebook Bawaslu.....	23
Tabel 4.6 Perkembangan Twitter Bawaslu .....	23
Tabel 4.7 Perkembangan Solutif Bawaslu.....	25
Tabel 4.8 Livestreaming yang Pernah Dilakukan .....	26
Tabel 4.9 Webinar yang Pernah Dilakukan .....	28
Tabel 4.10 ILM yang Sudah Dibuat.....	28
Tabel 4.11 Seputar Info Bawaslu .....	29
Tabel 4.12 Perkembangan Poster dan Flyer.....	30
Tabel 5.1 MoU .....	35
Tabel 5.2 Data Diskusi Peraturan Bawaslu .....	43
Tabel 5.3 Data Kegiatan SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan Bawaslu Kabupaten Temanggung .....	46

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kondisi wilayah Kabupaten Temanggung sejak diumumkan kasus pandemic covid-19 sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2021 belum sepenuhnya dapat dikendalikan, hal ini berakibat terhadap kondisi kehidupan social ekonomi masyarakat belum pulih sepenuhnya, seperti masa-masa sebelum pandemic melanda, kejadian ini berpengaruh terhadap kinerja dan sosialisasi bagi Bawaslu Kabupaten Temanggung yang belum dapat menggelar kegiatan tatap muka secara langsung kepada masyarakat.

Peran Bawaslu Kabupaten/ Kota yang tidak sedang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu lebih kepada pencegahan dengan berbagai bentuk dan terobosan dengan mengerahkan segala kemampuan dalam melakukan sosialisasi peraturan perundanga-undangan, peran selanjutnya adalah melakukan evaluasi pengawasan serta pengelolaan, pemeliharaan, dan merawat arsip serta dokumentasi hasil kinerja Bawaslu Kabupaten/ Kota pada tahun sebelumnya, kegiatan ini bertujuan agar dokumen yang dikelola dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu mendatang.

Oleh karena itu disinilah peran penting Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagai garda terdepan dalam mempublikasikan kerja-kerja lembaga kepada publik secara tatap muka maupun *hybrid* dalam rangka mewujudkan Bawaslu yang terbuka, transparan, informatif dan akuntable, dengan demikian pengeloaan dokumen dan publikasi dibutuhkan system tata kelola data informasi kehumasan yang lebih berkualitas.

Tim kehumasan Bawaslu Kabupaten Temanggung terus-menerus mengembangkan pengelolaan dokumen dan publikasi, seiring berjalanya waktu dari tahun-ke tahun berupaya melakukan inovasi tata kelola kehumasan agar semakin informatif dan terbuka, serta membangun kepercayaan publik terhadap kinerja Bawaslu.

Upaya yang terus dilakukan adalah pengeloaan yang disesuaikan dengan perkembangan era industri 4.0, yang memungkinkan terjadinya kolaborasi antara teknologi digitalisasi informasi dengan teknologi otomatisasi dokumen yang berupa hasil-hasil kinerja lembaga, kemudian setelah diolah dengan seksama tim Humas Bawaslu Kabupaten Temanggung berusaha mempublikasikan kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut diantara yang dikembangkan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah publikasi pengenalan lembaga dengan kreatifitas menggunakan *fleyer* yang menarik dan mudah diterima oleh masyarakat, serta artikel-artikel pemberitaan aktivitas positif yang mendiskripsikan kegiatan Bawaslu Kabupaten Temanggung yang disebarkan melalui kanal-kanal media sosial yang tersedia, kemudian pembuatan konten-konten dengan berbagai platform baik berupa video, gambar, artikel dan seterusnya yang dapat

memberikan efek terbentuknya kepercayaan publik terhadap lembaga Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Komunikasi dua arah antara kehumasan Bawaslu Kabupaten Temanggung dan masyarakat dapat tercapai dengan baik apabila tersedia sumber daya kehumasan yang berkompeten dan sarana prasarana yang mendukung.

Dari sisi kompetensi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Humas Bawaslu Kabupaten Temanggung telah menggelar berbagai pelatihan yang dapat mendukung kinerja kehumasan seperti; pelatihan penulisan artikel, pelatihan pengambilan gambar, dan pelatihan pembuatan konten video dengan mengundang koresponden yang ahli dibidangnya masing-masing.

Dari sisi peningkatan sarana dan prasarana Humas Bawaslu Kabupaten Temanggung juga tengah berupaya melakukan pengadaan barang yang notabene dapat mendukung kinerja lembaga, tentunya juga disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Sedangkan dari sisi kinerja hukum lebih pada sosialisasi produk hukum, diskusi dan pemetaan, analisa serta diseminasi terhadap penyusunan peraturan Bawaslu.

Urgensi penyusunan laporan Hukum, Kehumasan, Data dan Informasi diantaranya adalah:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban perkembangan manajemen, pembenahan, dan peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat;
2. Mempermudah fungsi pelayanan dan koordinasi, serta membangun kepercayaan publik;
3. Upaya kehumasan dalam menyampaikan informasi segala aktivitas Bawaslu Kabupaten Temanggung kepada publik;
4. Meningkatkan partisipasi public dalam pengawasan pemilu;
5. Pendidikan demokrasi dan Kepemiluan bagi masyarakat;
6. Publikasi produk hukum dan peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan kepada masyarakat.

## **B. Dasar Hukum**

UUD 1945 pasal 28 huruf f : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14:

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.



(2). Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia.

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi public;

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi dan Partisipasi Masyarakat;

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilu

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Keterbukaan informasi.

## BAB II

### TUGAS DIVISI HUKUM HUMAS, DATA DAN INFORMASI

Tugas dan kewenangan divisi hukum humas, data dan informasi, sebagai berikut:

- A. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berkaitan dengan hukum, keterbukaan Informasi dan Partisipasi Masyarakat, diantara tugas Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi adalah :
1. Hukum diantaranya adalah pembentukan peraturan, advokasi, analisa dan dokumentasi hukum.
  2. Humas dan data informasi adalah Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa tugas dan kewenangan Koordinator Divisi Hukum Humas data dan informasi adalah :
- a. pembentukan peraturan perundang-undangan;
  - b. advokasi dan pendampingan hukum;
  - c. penyiapan analisis dan kajian hukum;
  - d. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
  - e. pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;
  - f. hubungan masyarakat;
  - g. pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu;
  - h. koordinasi internal dalam pengelolaan terhadap:
    - 1). basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan
    - 2). basis data Bawaslu;

- i. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dan/atau data informasi;
- j. pemantauan dan evaluasi; dan
- k. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.

## BAB III

# SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA HUMAS

### A. Sumber Daya Manusia

#### 1. Personil Hukum dan Humas

Personil Humas Hukum Data dan Informasi diisi oleh lulusan ahli bidang teknologi informasi dan bidang lain yang telah memenuhi syarat.

Dinamika tata kelola humas data dan informasi di Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak hanya bertumpu pada bidang Humas saja, namun Humas Bawaslu Kabupaten Temanggung mengerahkan seluruh potensi personil yang ada baik dari Divisi Pengawasan, Divisi Penindakan, Divisi Organisasi dan SDM maupun Divisi Penyelesaian Sengketa untuk berkolaborasi dan bekerja bersama guna terpenuhinya akses pemberitaan akurat dan informasi aksesabel bagi publik.

Namun demikian sebelum di publikasikan, konten atau artikel dilakukan review oleh tim Kehumasan dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan yang membidangi Kehumasan, data dan informasi.

Berikut disajikan tabel jumlah SDM dan bidang keahlian yang dimiliki Humas Bawaslu kabupaten Temanggung.

**TABEL 3.1**

**JUMLAH SDM HUKUM DAN HUMAS**

	TA.2018	TA. 2019	TA.2020	TA.2021
Jumlah SDM Humas	1 (Anggit)	2 (Anggit dan Yusi)	2 (Anggit dan Yusi)	2 (Anggit dan Yusi)
Keahlian	Videografi, Fotografi, Desain	Videografi, Fotografi, Desain	Videografi, Fotografi, Desain	Videografi, Fotografi, Desain
Jumlah SDM Bidang Hukum	1 (Anis)	1 (Sofi)	1 (Anggun)	1 (Adi)
Keahlian	Mengerti tentang hukum, paham membuat kajian	Mengerti tentang hukum, paham membuat kajian	Mengerti tentang hukum, paham membuat kajian	Mengerti tentang hukum, paham membuat kajian

## 2. Peningkatan Kapasitas SDM Hukum, Humas dan Data Informasi

Peningkatan kapasitas SDM hukum humas dan Data informasi ini terbagi kedalam 3 (tiga) kategori, kategori pertama diselenggarakan oleh Bawaslu RI , kategori kedua diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kategori ketiga diselenggarakan oleh internal Bawaslu Kabupaten Temanggung. Berikut ini disajikan tabel penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM bagi personil Hukum, Humas, Data dan Informasi:

**TABEL 3.2**

### **PENINGKATAN KAPASITAS YANG DISELENGGARAKAN OLEH BAWASLU RI**

No	Hari/Tanggal	Tempat	Kegiatan
Tahun 2018			
1	Senin s.d Rabu 3 s.d 5 Desember 2018	Jl. Raya Puncak km. 83 Bogor	Bimbingan teknis Hukum acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2019
Tahun 2019			
2	Selasa s.d Kamis 26 s.d 28 Februari 2019	Hotel Royal Kuningan	Rapat koordinasi Nasional Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Tahun 2019 Gelombang V
3	Kamis 28 Maret 2019	Hotel Mercure Jakarta Kota	Rapat kerja teknis Pengelolaan Website Bawaslu Kab/Kota untuk keterbukaan Informasi Pemilu
4	Selasa s.d Rabu 2 s.d 3 Juli 2019	Aone Hotel Jakarta	Bimbingan Teknis Penyusunan Alat bukti Hukum acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2019
5	Kamis 25 Juli 2019	Gedung Mahkamah Konstitusi	Menghadiri Sidang Hukum acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Mahkamah Konstitusi
6	Kamis s.d Sabtu 22 s.d 24 Agustus	Mercure Convention Centre	Evaluasi tugas dan fungsi Divisi Hukum serta Pelaksanaan PHPU

	2019	Ancol - Jakarta	dalam Pemilu tahun 2019 – Gel II
7	25 Oktober 2019	Media center Bawaslu Temanggung	Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Divisi Hukum data dan Informasi oleh Bawaslu RI secara Daring
Tahun 2020			
8	08 Juni 2020	Media center Bawaslu Temanggung	Koordinasi Optimalisasi peran Kehumasan dan Pengelolaan Informasi, oleh Bawaslu RI secara daring
Tahun 2021			
9	6 Oktober 2021	Media center Bawaslu Temanggung	Bawaslu RI Kerja sama dengan Face book koordinasi dilakukan secara daring, dalam rangka peningkatan kapasitas pengawasan iklan kampanye dan kampanye di Media Sosial utamanya Facebook.

**TABEL 3.3**

**PENINGKATAN KAPASITAS YANG DISELENGGARAKAN BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Hari/Tanggal	Tempat	Kegiatan
Tahun 2018			
1	Rabu s.d Kamis 19 s.d 20 September 2018	Hotel Novotel Semarang	Sosialisasi Berbasis Informasi dan Teknologi dengan tema “Pencegahan Pelanggaran Melalui Sistem Keterbukaan Informasi di Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota se-Jawa Tengah”
Tahun 2019			
2	Kamis	Aula Lantai IV Dinas Kominfo	Sosialisasi Peraturan Kominfo Nomor 1 Tahun 2019 tentang

	28 Maret 2019	Provinsi Jawa Tengah	Informasi Publik
3	Selasa 09 April 2019	Ruang Merapi 2 Hotel Grasia Kota Semarang	Rapat kerja teknis dengan Media tema “Penguatan Fungsi Kehumasan Media Bawaslu di Jawa Tengah”
4	Kamis s.d Sabtu 16 s.d 18 Mei 2019	Ballroom Hotel Sunan Surakarta	Konsolidasi data dalam persiapan perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2019
5	Rabu s.d Jum’at 29 s.d 31 Mei 2019	Merapi Ballroom Lobby Floor – Novotel, Kota Semarang	Rakernis Penyusunan keterangan tertulis dalam menghadapi persidangan PPHU di MK
6	Minggu s.d Selasa 23 s.d 25 Juni 2019	Hotel Horison Semarang	Rakernis dalam rangka finalisasi penyusunan keterangan tertulis PPHU
7	Rabu s.d Jum’at 14 s.d 16 Agustus 2019	Hotel San Q Ta Guci Tegal	“Penerbitan Buku Hasil Kinerja dan Prestasi Bawaslu di Jawa Tengah”
8	Rabu s.d Kamis 6 s.d 7 November 2019	Fave Hotel Cilacap	“Pembentukan PPID Bawaslu Kab/Kota Se-Jawa Tengah”
Tahun 2020			
9	11 Mei 2020	Media Center Bawaslu Kab. Temanggung	Bedah Buku dan bimbingan teknis Cara Mudah Menulis Berita Dan Siaran Pers Bagi Pengawas Pemilu” oleh bawaslu provinsi Jawa tengah via Daring.tujuannya membuat narasi berita yang dapat dipahami oleh public.
10	18 mei 2020	Aula Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung	Koordinasi pembahasan penyusunan SOP PPID yang dilakukan secara daring yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
11	09 Juni 2020	Media Center	Rapat Dalam Jaringan (Daring)

		Bawaslu Kab. Temanggung	yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah membahas tentang sosialisasi JDIH yang mengacu pada Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. JDIH merupakan bagian dari program Bawaslu RI yang butuh dukungan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
12	Kamis s.d Jumat 13 s.d 14 Agustus 2020	Braling Grand Hotel Purbalingga	Diseminasi Peraturan Perundang-undangan
13	Senin s.d Selasa 24 s.d 25 Agustus 2020	Hotel Moetel Kebumen	Rakernis Persiapan Monev Website PPID Tahap ke-2 dengan Bawaslu Kab/Kota
14	06 s.d 07 September 2020	Griya Persada Hotel Bandungan	Rapat Peningkatan Kapasitas Kehumasan Bawaslu Kab/Kota
Tahun 2021			
15	Senin 22 Februari 2021	Media Center Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengelolaan dan Pelayanan informasi Bawaslu Kab/Kota se-Jawa Tengah
16	Rabu 14 April 2021	Kantor Bawaslu Kabupaten Purworejo	Persiapan Digitalisasi Dokumen dan pemutakhiran DIP Bawaslu Kab/Kota se-Jawa Tengah
17	Senin s.d Selasa 11 s.d 12 Oktober 2021	Kantor Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Review Monev Kehumasan, Produk Buletin dan DIP Bawaslu Kab/Kota se-Jawa Tengah
18	Jumat s.d Sabtu 19 s.d 20 November	Kantor Bawaslu kabupaten Jepara	Rakernis Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah dalam Pembentukan Perbawaslu Pemilu



	2021		dan Pemilihan Tahun 2024 Gelombang V
19	Kamis s.d Jumat 09 s.d 10 Desember 2021	Kantor Bawalu Kabupaten Banyumas	Rakorwil Digitalisasi Data dan Dokumentasi
20	Rabu 15 Desember 2021	Media center Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Rapat Persiapan penyusunan Laporan Akhir Kehumasan dan Layanan Informasi Public Tahun 2021

**TABEL 3.4**

**PENINGKATAN KAPASITAS YANG DISELENGGARAKAN BAWASLU KAB. TEMANGGUNG**

No	Hari/Tanggal	Tempat	Kegiatan
Tahun 2020			
1	18 Februari 2020	Hotel Allyana Temanggung	Bawaslu Kabupaten Temanggung menyelenggarakan Pelatihan menulis dan Keprotokolan, Bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Forum Jurnalis Temanggung (FJT) dan Protokol Humas setda Temanggung.
2	19 September 2020	Aula Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pelatihan Videografi, pembuatan konten video, dengan nara sumber ahli bidang pembuatan video
3	27 Oktober 2020	Aula Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pelatihan Fotografi jajaran Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan Tujuan Memberikan pelatihan tehknik pengambilan gambar guna kepentingan konten publikasi
Tahun 2021			
3	14 Oktober 2021	Aula Sekretariat Bawaslu Kabupaten	koordinasi internal, terkait agenda humas untuk ditindak lanjuti

		Temanggung	tentang penyusunan program kerja Konten di Media Sosial, Iklan layanan masyarakat, penerbitan Buletin, Sarana kehumasan, DIP (daftar informasi publik), kegiatan talk show secara live dan sebagainya.
4	Kamis 21 Oktober 2021	Aula KPU Kabupaten Temanggung	Rakor Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Kepemiluan Lintas Instansi Terkait

## B. Sarana dan Prasarana Humas

Sebagai penunjang Kegiatan Kehumasan Data dan Informasi dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, berikut disajikan tabel sarana dan prasarana yang dimiliki oleh tim Humas Bawaslu Kabupaten Temanggung

**TABEL 3.5**

### **SARANA DAN PRASARANA HUMAS**

Jenis Alat	Jumlah	Tahun Pengadaan	Kondisi
Handycam	2	2018	Baik
PC	3	2018	Baik
DSLR	1	2018	Baik
Perekam Suara	1	2018	Baik
Speaker	1	2018	Baik
Clip On	2	2021	Baik
Mic	3	2021	Baik
Greenscreen	1	2021	Baik
Lampu	4	2021	Baik

## BAB IV

### PUBLIKASI PEMBERITAAN DAN MEDIA SOSIAL

#### A. Platform Media dan Perkembangannya di Bawaslu Kab. Temanggung

##### 1. Buletin Suara Bawaslu

Buletin adalah media publikasi cetak internal lembaga yang dimanfaatkan lembaga Bawaslu Kabupaten Temanggung untuk distribusi informasi didesain menarik, yang berisi informasi dua arah antara manajemen, pimpinan dan staf dalam rangka kegiatan membangun kepercayaan seluruh entitas untuk memajukan lembaga Bawaslu.

Buletin Suara Bawaslu Kabupaten Temanggung berfungsi sebagai alat komunikasi internal antar pegawai dan juga memberikan nilai lebih kepada humas dalam menjalankan tugasnya sebagai fasilitator komunikasi antar instansi dan juga public secara luas.

Segala informasi yang disampaikan dalam buletin merupakan salah satu bentuk keterbukaan sistem kebijakan yang di jalankan Pada lembaga Bawaslu tersebut kepada masyarakat untuk menjaga kondisi stabilitas lembaga.

Kehadiran buletin membantu divisi humas dalam menjalin komunikasi dua arah antara humas dengan publik guna tercapainya tujuan meningkatkan partisipasi yang telah ditetapkan.

Buletin Suara Bawaslu Kabupaten Temanggung dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja lembaga kepada public.

Berikut disajikan tabel perkembangan Buletin Suara Bawaslu Kabupaten Temanggung:

**TABEL 4.1**  
**PERKEMBANGAN BULETIN SUARA BAWASLU**

Tahun	Edisi	Tema	Link buletin
2018	-	-	-
	-	-	-
2019	1	Pengawasan Pemilu	<a href="https://bit.ly/3ylFaen">https://bit.ly/3ylFaen</a>
	2	Pencegahan Pemilu	<a href="https://bit.ly/3Ep9xbj">https://bit.ly/3Ep9xbj</a>
2020	-	-	-
	-	-	-
2021	3	Giat Di Masa Pandemi	<a href="https://bit.ly/3H5UXam">https://bit.ly/3H5UXam</a>
	4	Pemuda dalam Demokrasi	<a href="https://bit.ly/3ErumbCB">https://bit.ly/3ErumbCB</a>

## 2. Website

Website merupakan salah satu kebutuhan yang menjadi prioritas untuk Lembaga Bawaslu dalam mengembangkan relasi dengan masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan website tidak hanya digunakan sebagai media informasi saja, namun juga sebagai media untuk mendekatkan Lembaga Bawaslu dengan masyarakat, berikut ini merupakan beberapa keuntungan bagi Lembaga Bawaslu yang mempunyai website :

Lembaga Bawaslu dapat memberikan informasi secara lengkap mengenai layanan publikasi yang diberikan. dengan cara memanfaatkan website, sehingga Bawaslu dapat mengarahkan masyarakat ke informasi yang lebih lengkap.

Menjaga kredibilitas Bawaslu, sehingga terkesan lebih profesional dengan mempunyai website. Bawaslu akan lebih dipercaya oleh masyarakat dengan jaminan keamanan informasi, data, dan lainnya.

Lembaga Bawaslu dapat memperluas jangkauan informasi, dapat menjangkau layanan informasi keseluruhan wilayah bahkan luar negeri.

Bagi Lembaga Bawaslu website dapat menambah layanan informasi yang luas dan target yang lebih banyak.

Masyarakat dapat mengunjungi website tidak terbatas waktu dimanapun selama terkoneksi dengan internet. cukup mengakses website Bawaslu Kabupaten Temanggung

Bawaslu dapat melakukan kegiatan *Customer Relationship management* yaitu upaya kegiatan mendekatkan Lembaga Bawaslu dengan Masyarakat.

Berikut disajikan data tabel perkembangan website Bawaslu Kabupaten Temanggung.

**TABEL 4.2**

### PERKEMBANGAN WEBSITE BAWASLU

Aspek	2018	2019	2020	2021
Jumlah pemberitaan	-	27	42	38
Page view	-	7.623	14.220	4.411

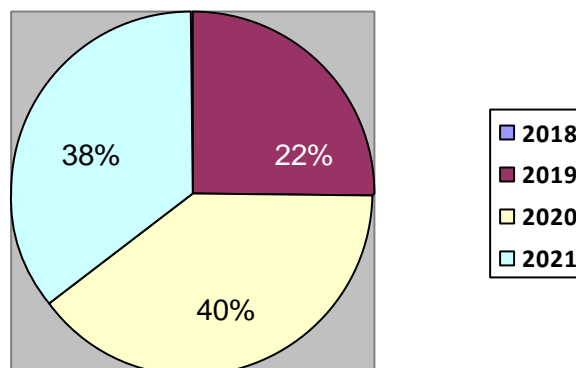


Diagram Perkembangan Website Bawaslu Kabupaten Temanggung

### 3. Youtube

YouTube merupakan situs web yang dirancang untuk berbagi video, Jutaan pengguna dari seluruh dunia telah membuat akun youtube sehingga mereka bisa mulai upload video agar dapat ditonton pengguna di seluruh dunia.

Bawaslu Kabupaten Temanggung tengah berupaya terus-menerus mengembangkan konten-konten video di youtube baik yang bersifat live maupun deley dengan mengungung tema Solutif (Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif) yang dimanfaatkan untuk mempublikasikan berbagai platform sosialisasi baik dari sisi pengawasan, kehumasan, SDM, penindakan pelanggaran maupun Sengketa yang berkaitan dengan hasil kinerja Bawaslu. Berikut disajikan perkembangan situs web chanel youtube Humas Bawaslu Kab. Temanggung :

**TABEL 4.3**  
**PERKEMBANGAN YOUTUBE**

Aspek	2018	2019	2020	2021
Jumlah Konten Video	-	1	12	20
Subscriber	-	40	101	161
Page view	-	76	1.116	1.849

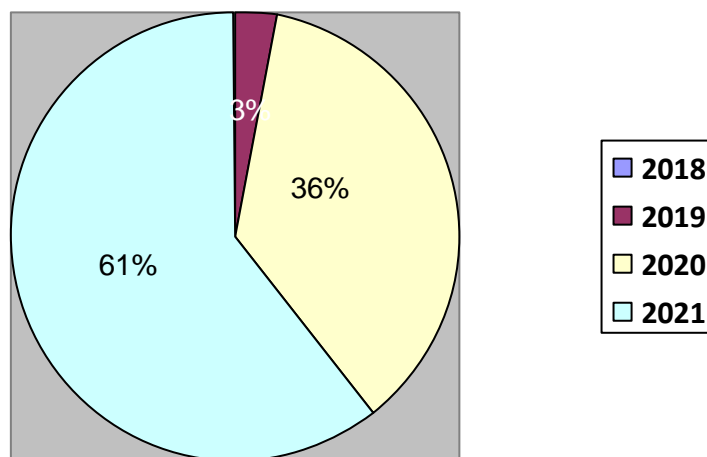


Diagram Perkembangan Youtube Bawaslu Kabupaten Temanggung

### 4. Instagram

Instagram (disingkat IG atau Insta) adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring social.

Bawaslu Kabupaten Temanggung tengah berupaya terus-menerus mengembangkan konten-konten foto-foto dan video yang mendiskripsikan tentang pengenalan lembaga dan kinerja Bawaslu Kabupaten Temanggung.

**TABEL 4.4**

**PERKEMBANGAN INSTAGRAM**

Aspek	2018	2019	2020	2021
Jumlah Konten Foto	5	38	82	85
Follower	32	302	639	809

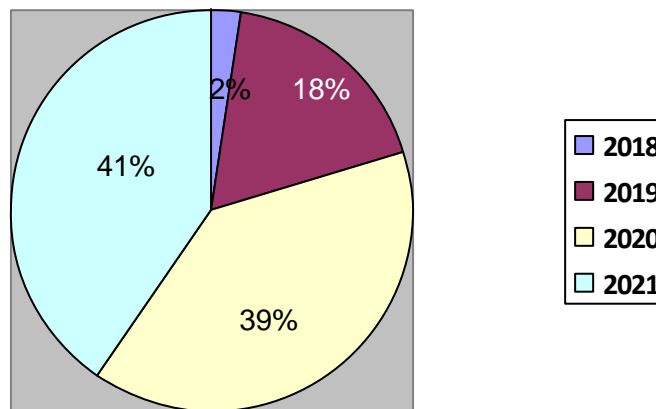


Diagram Perkembangan Instagram Bawaslu Kabupaten Temanggung

**5. Facebook**

Facebook adalah sebuah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Frasa “Buku Muka” merupakan prinsip dasar yang membedakan facebook dengan jejaring sosialnya, yaitu menampilkan seluruh informasi dari pengguna tersebut.

Facebook menawarkan berbagai fitur canggih yang belum pernah ada di sosial media sebelumnya. Selain dapat bertukar pesan, dengan facebook seorang pengguna dapat menciptakan halaman pribadi, menambahkan teman, membuat dan mengupdate status, membagikan berbagai jenis konten, video call dan banyak lagi.

Bawaslu Kabupaten Temanggung tengah berupaya terus-menerus mengembangkan konten-konten foto-foto dan video dengan berbagai platform yang mendiskripsikan tentang pengenalan lembaga dan kinerja Bawaslu Kabupaten sehingga lembaga Bawaslu dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat.

**TABEL 4.5****PERKEMBANGAN FACEBOOK**

Aspek	2018	2019	2020	2021
Jumlah Konten Foto	53	48	67	58
Jumlah Konten Video	1	-	2	4
Jumlah Konten Berita	58	48	29	16
Follower	989	1.254	2.354	3.824

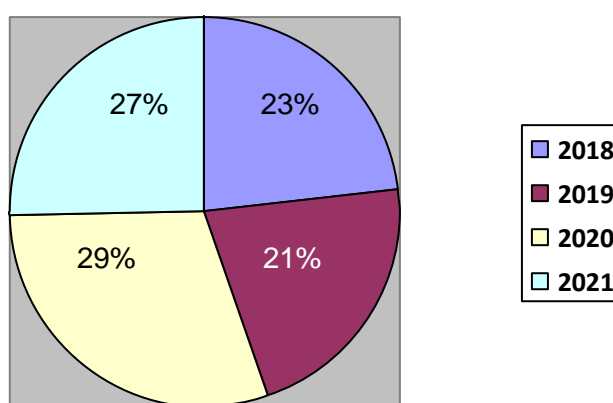


Diagram Perkembangan Facebook Bawaslu Kabupaten Temanggung

**6. Twitter**

Twitter layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks.

Bawaslu Kabupaten Temanggung tengah berupaya terus-menerus mengembangkan tulisan-tulisan dengan berbagai platform yang mendiskripsikan tentang pengenalan lembaga dan kinerja Bawaslu Kabupaten Temanggung sehingga lembaga Bawaslu dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat.

**TABEL 4.6****PERKEMBANGAN TWITTER**

Aspek	2018	2019	2020	2021
Jumlah Konten	30	90	113	69
Page view	10	84	137	167

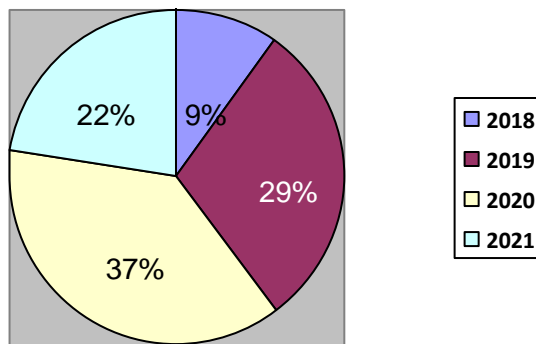


Diagram Perkembangan Twitter Bawaslu Kabupaten Temanggung

## B. Jenis Konten

Media publikasi yang digunakan Bawaslu Kabupaten Temanggung juga dibuat lebih kreatif dengan memanfaatkan berbagai konten, beberapa konten yang tengah dikembangkan di Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

### 1. Podcast Solutif

Jenis Kegiatan	: Publikasi Bawaslu melalui <i>Podcast</i>
Nama Kegiatan	: SOLUTIF (Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif)
Waktu	: ditayangkan secara berkala sesuai dengan kebutuhan
Sasaran	: seluruh warga masyarakat Temanggung
Out Put	: Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap Demokrasi, Kepemiluan, Tugas dan Kewenangan Bawaslu
Media	: Youtube Humas Bawaslu Kabupaten Temanggung
Diskripsi Kegiatan	: Kegiatan ini berupa diskusi dan tanya jawab antara nara sumber dengan host, nara sumber berasal dari berbagai kalangan seperti komisioner Bawaslu akademisi, pejabat, tokoh agama dan masyarakat yang berkompeten di bidangnya



**TABEL 4.7****PERKEMBANGAN SOLUTIF**

No	Tanggal	Tema Solutif	Nara Sumber
1	12 Oktober 2020	Peran Humas dalam Bawaslu Kabupaten Temanggung	Sam Fery Baehaki, S.Pd.I
2	22 Januari 2021	Beberapa Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Temanggung Selama Tahun 2020	Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H
3	30 Maret 2021	Pemohon Sengketa Proses Pemilu	Murti Anggono, S.Hut
4	29 April 2021	Perbedaan Sengketa Pemilihan dan Sengketa Pemilu	Murti Anggono, S.Hut
5	29 Mei 2021	Sengketa dalam Konsep Keadilan Pemilu	Maria Ulfah, A.Md
6	23 Juni 2021	Peranan SDM di Bawaslu	Amin Stiyono, S.H
7	30 Juni 2021	Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Semua Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Temanggung
8	30 Juli 2021	Dukungan Sekretariat dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos dan Adi Faisal Azis, S.H
9	26 Agustus 2021	Publikasi Daftar Informasi Publik	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi., M.Pd
10	31 Agustus 2021	Tahapan Adjudikasi dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Murti Anggono, S.Hut
11	30 September 2021	Potensi Sengketa pada Tahapan Pencalonan	Murti Anggono, S.Hut dan Sam Fery Baehaki, S.Pd.I

12	27 Oktober 2021	10 Tahapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu"	Heru Cahyono, S.Sos., M.A dan Amin Stiyono, S.H
13	30 November 2021	Potensi Sengketa pada Tahapan Pemilu dan Pilkada	Murti Anggono, S.Hut
14	30 Desember 2021	Harbulteng (Hari Bedah Buletin Se-Jawa Tengah)	Sam Fery Baehaki, S.Pd.I
15	31 Desember 2021	Identifikasi Permasalahan Pemilu & Pilkada dalam Ranah Sengketa	Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H dan Murti Anggono, S.Hut

## 2. Livestreams

Livestream pernah dilaksanakan 4 (empat) kali oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung pada kegiatan Webinar Pojok Pengawasan, Pembinaan Desa Anti Politik Uang di Desa Purwosari Kecamatan Wonobojo , Sosialisasi 10 tahapan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu dan yang terakhir belum lama ini yaitu Peringatan Harbulteng (Hari Bedah Buletin Se-Jawa Tengah) melalui kanal Instagram dan Youtube Bawaslu Kabupaten Temanggung

**TABEL 4.8**

### **LIVESTREAMING YANG PERNAH DILAKUKAN**

No	Tanggal	Tema	Narasumber
1	08 September 2021	Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu	Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum dan Agus Sujarwo, AP., M.M
2	15 Oktober 2021	Pengembangan Desa Anti Politik Uang	Murti Anggono, S.Hut dan Amin Stiyono, S.H
3	27 Oktober 2021	10 tahapan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu	Heru Cahyono, S.Sos, MA dan Amin Stiyono, S.H
4	30 Desember 2021	Hari Bedah Buletin Se-Jawa Tengah	Sam Fery Baehaki, S.Pd.I., M.Pd

### 3. Webinars

Bawaslu Temanggung tidak berhenti melakukan kegiatan pendidikan pemilih dan upaya-upaya pencegahan. Bawaslu Temanggung tetap menggelar Diskusi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif secara webinar/ daring (SKPP Daring) dan program ini sudah dilaksanakan sejak Bulan April 2020. "SKPP Daring diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat. Dengan menggunakan teknologi informasi dan media sosial, SKPP Daring menjadi jalan keluar dari keterbatasan ruang dan waktu dalam penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pilkada, kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 11 Juni 2020.

Bertempat di Aula SMK Bhumi Phala Temanggung, Bawaslu Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan SMK Bhumi Pala Parakan Kabupaten Temanggung menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif melalui Webinar yang bertajuk "BUMI PALA (Bincang Pemilu dan Demokrasi Bareng Pemilih Pemula)". Kegiatan dilakukan pada tanggal 10 November 2020 tersebut dilaksanakan dengan protocol Covid-19 ketat mengingat karena pandemic yang sedang berlangsung. Kegiatan melibatkan pemilih pemula dengan beberapa peserta dari SMU/SMK di beberapa wilayah Temanggung, yang melakukan melalui *webinar zoom* diantaranya Siswa SMK Bhumi Phala Temanggung, Siswa SMK Bansari, Siswa SMK Negeri 1 Temanggung, Siswa SMK Negeri Jumo, Siswa SMK Negeri Pringsurat, Siswa SMK YP 17 Parakan, Siswa SMA Negeri Parakan, Siswa SMA Negeri Candiroto dan beberapa guru pembimbing dari masing-masing sekolah. Kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada pemilih pemula terkait Pemilu dan demokrasi ini diisi oleh narasumber Amin Stiyono, SH (Kordiv. SDM dan Organisasi Bawaslu Kab. Temanggung), Murti Anggono, S.Hut. (Kordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Temanggung) dan Eko Suseno, S.Pd. (Wakil Kepala Sekolah SMK Bhumi Pala – Parakan). Sumber pembiayaan dari kegiatan ini bersumber dari DIPA Bawaslu Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020.

Rabu, 8 September 2021. Bawaslu Kabupaten Temanggung menyelenggarakan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan mengambil tema " Peran Pemilih Pemula dalam Pengawasan Pemilu". tema besar ini diambil dengan alasan pemilih pemula yang berusia 17 tahun mempunyai potensi besar ikut berpartisipasi mensukseskan implementasi demokrasi di tengah-tengah masyarakat. Sosialisasi diselenggarakan via daring/ webinar dengan media zoom meeting dan live you tube, kegiatan ini mengundang nara sumber Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum, dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Agus Sujarwo, AP., M.M, adapun pemantik diskusi adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung Erwin Nurrachmani Prabawanti, SH.

**TABEL 4.9****WEBINARS YANG PERNAH DILAKUKAN**

No	Tanggal	Tema	Narasumber
1	11 Juni 2020	Diskusi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif	Semua Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Temanggung
2	8 September 2021	Peran Pemilih Pemula dalam Pengawasan Pemilu	Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum dan Agus Sujarwo, AP., M.M

**4. Iklan Layanan Masyarakat**

Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang berisikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah permasalahan ataupun kondisi sosial yang sedang dihadapi. namun inisiatif Bawaslu Kab Temanggung dengan menyisipkan pengenalan tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu disamping pengetahuan demokrasi Kepemiluan.

**TABEL 4.10****ILM YANG SUDAH DIBUAT**

No	Tanggal	Tema ILM	Tujuan ILM
1	29 September 2020	Bawaslu New Normal	Mengedukasi masyarakat untuk selalu waspada dan mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi.
2	14 Oktober 2020	Bawaslu Sidak Rombongan Kampanye tanpa Protokol Kesehatan	Meskipun sedang berkampanye pun tetap haru selalu patuhi protocol kesehatan di masa pandemi

**5. Seputar Info Bawaslu**

Seputar Info Bawaslu Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan peliputan dan rangkuman aktivitas Bawaslu Kabupaten Temanggung yang biasa dilakukan di media center Bawaslu Kabupaten Temanggung, dan dilaksanakan setelah rangkaian serta peliputan kegiatan Bawaslu selesai dilakukan.

Seputar Info Bawaslu Kabupaten Temanggung dibawakan atau disiarkan oleh staff Bawaslu Kabupaten Temanggung secara bergantian. Jadi siapapun bisa menjadi pembawa berita Seputar Info Bawaslu Kabupaten Temanggung. Penyiaran Seputar Info Bawaslu Kabupaten Temanggung ini bertujuan untuk menyampaikan berita mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung.

**TABEL 4.11**

**SEPUTAR INFO BAWASLU**

No	Tanggal	Tema Seputar Info Bawaslu	Kegiatan Yang Diliput
1	29 Desember 2020	Desa Anti Politik Uang	Meliput kegiatan Bawaslu Kabupaten Temanggung ketika melaksanakan Pembinaan Desa Anti Politik Uang di Desa Wonotirto Kecamatan Bulu pada tanggal 16 November 2020
2	19 Januari 2021	Desa Pengawasan	Meliput kegiatan Bawaslu Kabupaten Temanggung ketika melaksanakan Pembinaan Desa Pengawasan di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu pada tanggal 9 November 2020
3	25 Maret 2021	Pemutakhiran DPB	Bawaslu Kabupaten Temanggung mengikuti Rapat Koordinasi mengenai Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan periode Maret 2021 yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Temanggung
4	22 Oktober 2021	Pembentukan BAKOHUMAS	Bawaslu Kabupaten Temanggung mengikuti Rapat Koordinasi Pembentukan BAKOHUMAS Kepemiluan Lintas Instansi yang dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Temanggung

## 6. Poster/ flyer

Pembuatan Poster/ flyer atau Tulisan dalam rangka memperingati hari nasional merupakan salah satu tugas kehumasan. setiap memperingati hari nasional ataupun hari besar, Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak pernah luput dalam pembuatan poster kemudian diupload di media sosial.

Pembuatan Poster ataupun tulisan selain bertujuan untuk merayakan hari nasional maupun hari besar nasional, HUT, milad ucapan juga sebagai cara Bawaslu Kabupaten Temanggung memaknai hari nasional tersebut dan dalam rangka memberikan ucapan selamat terhadap, Hari besar, Hari Peringatan, milad, Ultah, Hari Jadi yang disertai kata-kata Mutiara dengan dibubuhi logo dan Nama Bawaslu. Hal ini tujuan utamanya adalah mengenalkan lembaga Bawaslu kepada warga net.

**TABEL 4.12**

### **PERKEMBANGAN POSTER DAN FLYER**

Aspek	2018	2019	2020	2021
Jumlah Poster/Fleyer	-	12	35	57
Page view	0	286	674	1181

## 7. eBook

Jenis Kegiatan	: Penerbitan Buku
Nama Kegiatan	: BUKU TAPAK DEMOKRASI
Waktu	: Setahun terbit Satu Kali
Sasaran	: Masyarakat Temanggung
Out Put	: Publikasi dan Sosialisasi segala aktivitas dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagai bentuk tanggung jawab Publik atas kinerja Bawaslu Kabupaten Temanggung.
Media	: e-Book
Diskripsi Kegiatan	: Dokumentasi segala aktivitas dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Temanggung kemudian dinarasikan dalam bentuk tulisan yang dirangkum dalam buku Bawaslu Kabupaten Temanggung

## **BAB V**

### **CAPAIAN HUKUM**

#### **Advokasi (Bantuan Hukum) dan Dokumentasi Hukum (JDIH)**

##### **A. Advokasi (Bantuan Hukum)**

Salah satu divisi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung yang mempunyai peranan dan fungsi penting adalah Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, disamping memiliki fungsi sebagai tangan panjang Bawaslu dalam mempublikasikan segala aktivitas Bawaslu dan pendokumentasian hasil-hasil kinerja Bawaslu, juga yang berkaitan dengan fungsi hukum. Peran dan fungsi divisi hukum sebagai analis hukum, rekomendasi hukum dan bantuan hukum serta dokumentasi hukum dalam melaksanakan tugas-tugas kepepengawasan, hal ini berdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilu.

Bantuan hukum merupakan pemberian layanan hukum oleh unit kerja Bawaslu kepada pejabat dan/atau pegawai Bawaslu dalam menangani masalah hukum, kemudian juga berkaitan dengan analisis dan dokumentasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, Koordinator divisi hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan dokumentasi hukum. Analisa hukum dilakukan jika terjadi penanganan pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian sengketa proses Pemilu, dengan keputusan akhir berdasarkan rapat pleno semua anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya koordinator divisi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu koordinator divisi hukum juga bertugas melakukan pemantauan putusan dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, yang menyebutkan divisi hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut keputusan Bawaslu, putusan pengadilan dan DKPP tentang pelanggaran Pemilu, tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu oleh instansi yang berwenang, serta penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum.

Adapun tugas divisi hukum yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Pengawasan Bawaslu adalah terkait :

1. Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu
2. Pengaduan dan Konsultasi Hukum
3. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Perkara Hukum lain yang dapat diberikan oleh Bawaslu adalah :

1. Perkara kode etik;
2. Uji materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
4. Pengaduan hukum;
5. Konsultasi hukum;
6. Alternatif penyelesaian sengketa;
7. Pemberian keterangan tertulis di MK;
8. Permasalahan hukum lain yang melibatkan Bawaslu.

Bawaslu Kabupaten Temanggung selama tahun anggaran 2021 belum melakukan kegiatan advokasi terhadap permasalahan hukum kepada pegawai dan jajaran pengawas, belum pernah melakukan pemantauan putusan yang berkaitan dengan tindak lanjut penanganan pelanggaran pemilu, kode etik maupun penyelesaian sengketa.

Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Temanggung selama kurun waktu tahun 2021 lebih aktif dalam bidang praktik hukum, desiminisasi, sosialisasi dan bedah atau diskusi terkait Undang-undang, peraturan Badan pengawas Pemilu, Peraturan KPU, peraturan lainnya dan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu dan demokrasi.

## **B. Dokumentasi Hukum**

Dokumentasi hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan, ketetapan, yang dihasilkan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung dan telah dikelola disimpan, dikirim, dan/atau diterima yang berkaitan dengan pengawasan dan penyelenggara Pemilu di lingkungan Bawaslu Kabupaten Temanggung. Dokumentasi hukum yang telah dilakukan, mengenai :

### *Standar Operating Procedure (SOP)*

Berkaitan dengan Dokumentasi produk Hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Temanggung yang telah di buat adalah *Standar Operating Procedure (SOP)* pelayanan informasi publik, pembuatan SOP dimulai sejak 18 Mei 2020 dengan melibatkan Anggota Hukum Datin se- Jawa Tengah, kemudian hasilnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi Kabupaten/ kota masing-masing, adapun SOP dimaksud adalah sebagai berikut:

1. SOP tentang Pelayanan Informasi, mengatur standar pelayanan informasi yang berlaku di lingkungan Bawaslu Kabupaten Temanggung
2. SOP tentang Penanganan Keberatan, mengatur standar pelayanan keberatan yang berkaitan dengan keberatan pelayanan informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Temanggung;



3. SOP tentang Penanganan Sengketa Informasi, mengatur standar pelayanan jika terjadi sengketa informasi;
4. SOP tentang Pengelolaan Layanan Informasi, mengatur standar pengelolaan standar pelayanan informasi public;
5. SOP tentang penyampaian layanan nformasi public, mengatur tata cara dan prosedur penyampaian informasi;
6. SOP Penyusunan Daftar Informasi public, mengatur standar menyusun informasi publik.

Semua standar operasional prosedur yang telah dibuat telah dipublikasikan melalui kanal layanan informasi [ppid.temanggung.bawaslu.go.id/informasi-setiap-saat/](http://ppid.temanggung.bawaslu.go.id/informasi-setiap-saat/)

### **C. Surat Keputusan**

Surat atau ketetapan yang dibuat oleh lembaga Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam bentuk tertulis dengan dasar peraturan perundang-undangan yang mengatur. Surat Keputusan ini berfungsi sebagai pemberian atau keputusan sebagai solusi, penetapan tertulis secara resmi dari lembaga, atau jaminan legalitas hukum secara tertulis.

Berikut ini merupakan surat keputusan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung, adalah:

Surat Keputusan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Temanggung 2020;

Surat Keputusan Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Kabupaten Temanggung Tahun 2021;

1. SK Nomor :001/KP.01.00/JT-27/01/2021 s.d 011/ KP.01.00/JT-27/01/2021, tanggal 04 Januari 2021, Tentang Perjanjian Kontrak Kerja antara Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan Staff Pelaksana dan Staff Pendukung Bawaslu Kabupaten Temanggung;
2. SK Nomor: 01/HK.01.01/JT-27/02/2021, tanggal 08 Februari 2021, tentang Penetapan Tim Penyusunan Buletin Suara Bawaslu Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
3. SK Nomor : 02/HK.01.01/JT-27/06/2021, tanggal 07 Juni 2021, tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Desa Anti Politik Uang Desa Gejagan Kec. Ngadirejo Tahun 2021;
4. SK Nomor : 03/HK.01.01/JT-27/08/2021, tanggal 24 Agustus 2021, tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Desa Pengawasan Desa Kalibanger Kec. Gemawang Tahun 2021;

5. SK Nomor: 04/HK.01.01/JT-27/09/2021, tanggal 02 September 2021, tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Desa Pengawasan Kelurahan Temanggung I Kec. Temanggung Tahun 2021;
6. SK Nomor: 05/HK.01.01/JT-27/09/2021, tanggal 07 September 2021, tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Desa Pengawasan Desa Keblukan Kec. Kaloran Tahun 2021, tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Desa Pengawasan Desa Keblukan Kec. Kaloran Tahun 2021
7. SK Nomor: 06/HK.01.01/JT-27/09/2021, tanggal 08 September 2021, tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Webinar melalui Pojok Pengawasan “Peran Pemilih Pemula dalam Pengawasan Pemilu;
8. SK Nomor: 07/HK.01.01/JT-27/09/2021, tanggal 21 September 2021, tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Desa Pengawasan Tahun 2021 Desa Samiranan Kec. Kandangan;
9. SK Nomor: 08/HK.01.01/JT-27/10/2021, tanggal 05 Oktober 2021, tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Desa Anti Politik Uang Desa Kertosari Kec. Jumo Tahun 2021;
10. SK Nomor: 09/HK.01.01/JT-27/10/2021, tanggal 15 Oktober 2021, tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Desa Anti Politik Uang Desa Purwosari Kec. Wonoboyo Tahun 2021;
11. SK Nomor: 10/HK.01.01/JT-27/10/2021, tanggal 28 Oktober 2021, tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Kampung Pengawasan Desa Rejosari Kec. Bansari Tahun 2021;
12. SK Nomor: 11/HK.01.01/JT-27/09/2021, tanggal 08 september 2021, tentang Penetapan Honorarium Narsum dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Webinar melalui Pojok Pengawasan “Peran Pemilih Pemula dalam Pengawasan Pemilu”;
13. SK Nomor: 12/HK.01.01/JT-27/11/2021, tanggal 11 November 2021, tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Desa Pengawasan Desa Tlogomulyo Tahun 2021.

#### **D. Memorandum of Understanding (MoU)**

MoU ini mengatur nota kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan *stake holders* dalam rangka peningkatan kinerja, pengawasan partisipatif dan pelayanan publik

**TABEL 5.1****MoU**

No	Tanggal	Nomor Surat	Stake Holder	Tentang
1	19 Januari 2019	034/Bawaslu- Prov.JT- 27/HK.00/I/2019	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung tentang Pendidikan Pemilih Pemula Bagi Siswa Sekolah Tingkat Atas
2	30 Oktober 2019	035/Bawaslu- Prov.JT- 27/HK.00/X/2019	Perguruan Tinggi STAINU Temanggung	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung tentang Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Civitas Akademik
3	8 November 2019	036/Bawaslu- Prov.JT- 27/HK.00/XI/2019	Pemerintah Desa Bandunggede Kecamatan Kedu	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Desa Bandunggede tentang Desa Pengawasan
4	8 November 2019	037/Bawaslu- Prov.JT- 27/HK.00/XI/2019	Pemerintah Desa Rejosari, Kecamatan Bansari	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Desa Rejosari tentang Desa Pengawasan
5	8 November 2019	038/Bawaslu- Prov.JT- 27/HK.00/XI/2019	Pemerintah Desa Malebo, Kecamatan Kandangan	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Desa Malebo tentang Desa Anti Politik Uang
6	8 November 2019	039/Bawaslu- Prov.JT-	Pemerintah Desa Wonotirto,	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu

		27/HK.00/XI/2019	Kecamatan Bulu	Kabupaten Temanggung dan Desa Wonotirto tentang Desa Anti Politik Uang
7	8 November 2019	040/Bawaslu- Prov.JT- 27/HK.00/XI/2019	Pemerintah Desa Pingit, Kecamatan Pringsurat	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Desa Pingit tentang Desa Anti Politik Uang
8	5 Februari 2020	001/Bawaslu- Prov.JT- 27/HK.00/II/2020	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Agung Temanggung	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan PDAM Tirta Agung Temanggung tentang Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Penanaman 1000 Pohon
9	9 April 2020	002/Bawaslu- Prov.JT- 27/HK.00/IV/2020	Palang Merah Indonesia (PMI)	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan PMI Kabupaten Temanggung tentang Solidaritas Kebangsaan Donor Darah
10	08 Juni 2021	01/HK.00.02/K.JT -27/06/2021	Pemerintah Desa Gejagan Kecamatan Ngadirejo	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Desa Gejagan Kec. Ngadirejo tentang Desa Anti Politik Uang
11	24 Agustus 2021	02/HK.00.02/K.JT -27/08/2021	Pemerintah Desa Kalibanger, Kecamatan Jumo	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Desa Kalibanger Kec. Gemawang tentang Desa Pengawasan
12	02 September 2021	03/HK.00.02/K.JT -27/09/2021	Pemerintah Kelurahan Temanggung I, Kecamatan	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Kelurahan

			Temanggung	Temanggung I Kec. Temanggung tentang Desa Pengawasan
13	07 September 2021	04/HK.00.02/K.JT -27/09/2021	Pemerintah Desa Keblukan Kecamatan Kaloran	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Desa Keblukan Kec. Kaloran tentang Desa Anti Politik Uang
14	21 September 2021	05/HK.00.02/K.JT -27/09/2021	Pemerintah Desa Samiranan, Kecamatan Kandangan	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Desa Samiranan Kec. Kandangan tentang Desa Pengawasan
15	05 Oktober 2021	06/HK.00.02/K.JT -27/10/2021	Pemerintah Desa Kertosari, Kecamatan Jumo	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Desa Kertosari Kec. Jumo tentang Desa Anti Politik Uang
16	15 Oktober 2021	07/HK.00.02/K.JT -27/10/2021	Pemerintah Desa Purwosari Kecamatan Wonoboyo	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Desa Purwosari Kec. Wonoboyo tentang Desa Pengawasan
17	11 November 2021	08/HK.00.02/K.JT -27/11/2021	Pemerintah Desa Tlogomulyo Kec. Tlogomulyo	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Desa Tlogomulyo Kec. Tlogomulyo tentang Desa Pengawasan

#### **E. Analisa Hukum Peraturan Perundang-undangan**

Analisa Hukum bagi Bawaslu Kabupaten Temanggung efektif dilakukan dengan cara diskusi dan pemahaman, pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan dengan cara bedah peraturan, pencermatan dengan melibatkan semua sumber daya manusia yang ada di jajaran Bawaslu Kabupaten Temanggung. Beberapa Peraturan yang pernah

diskusikan dan dilakukan pemetaan di Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Berdasarkan surat instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, nomor: 006/HK.01.00/K.JT-27/06/2021, tanggal 10 Juni 2021, tentang Penyusunan Daftar Inventarisir Masalah, dalam Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Bawaslu Kabupaten Temanggung mencermati dan menginventarisir permasalahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, hasil diskusi ditemukan 9 (sembilan) permasalahan sebagai berikut :

#### E. 1. Permasalahan

Di dalam Judul Perbawaslu mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum tetapi di dalamnya mengatur juga tentang penyelenggaraan Pemilihan (Satu peraturan mengcover dua Undang-Undang yaitu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan.)

Di bagian mengingat tidak dicantumkan dasar hukum tentang Pemilihan

Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan verifikasi pencalonan gubernur; (kurang spasi)

Kesalahan Penulisan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Panwaslu Kabupaten/Kota pada pasal 4 huruf b angka 2,3,4 dan huruf c, Pasal 12 (1), Pasal 14 (2)

Pasal 4 huruf c angka 1 tertulis Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) belum ada penjelasan dalam Ketentuan Umum

Pasal 6 ayat 3 huruf a angka 3 investigasi dalam ketentuan tidak dijelaskan

Pasal 7 ayat (2) (Perlengkapan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:) kesalahan penyebutan ayat Pasal 1 perlu ditambahkan tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PP LN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS LN)

Pasal 3 perlu ditambahkan tugas Pengawas TPS (PTPS)

Satu peraturan biasanya digunakan untuk menjelaskan satu Undang-Undang, namun pada Perbawaslu ini digunakan untuk menjelaskan dua Undang-Undang untuk Pemilu dan Pemilihan.

#### E. 2. Usulan, Masukan dan Perbaikan

Masukan perbaikan hasil pencermatan dan diskusi jajaran Bawaslu Kabupaten Temanggung terhadap permasalahan yang ditemukan adalah:

Pada bagian mengingat perlu ditambahkan Undang-Undang tentang Pemilihan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati;

disempurnakan atau disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Ditambahkan spasi pada kata pencalonan anggota menjadi pencalonan anggota. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan verifikasi pencalonan gubernur, (kurang spasi);

Disesuaikan dengan Pasal 1 angka 7 jo Pasal 2, menjadi Bawaslu Kabupaten/ Kota;

diganti dengan nama Pengawas Desa/Kelurahan sesuai dengan Undang-Undang 7 Tahun 2017;

Perlu penjelasan lebih lanjut tentang batasan investigasi;

Diganti menjadi (Perlengkapan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:) yang benar menjadi : Perlengkapan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

Perlu ditambahkan tugas PTPS, menjadi Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap: a. Persiapan pemungutan suara; b. pelaksanaan pemungutan suara; c. persiapan penghitungan suara; d. pelaksanaan penghitungan suara; dan e. pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS;

disempurnakan atau dibuat Perbawaslu terpisah untuk masing-masing Undang-Undang (UU Pemilu dan UU Pemilihan).

Berdasarkan undangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, nomor 077/KA.02/KJT/11/2021, tanggal 15 November 2021 tentang Rapat kerja Teknis Penyusunan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) dalam Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Gelombang V, yang akan diselenggarakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Jepara, pada Tanggal 19-20 November 2021, maka jajaran Bawaslu Kabupaten Temanggung dibawah koordinator divisi Hukum menggelar pemetaan dan diskusi terkait Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

### E. 3. Permasalahan :

Hasil diskusi dan bedah peraturan ditemukan sebelas permasalahan yang perlu diperbaiki dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, diantara permasalahan tersebut adalah :

1. Dalam Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 belum menyebutkan yang dimaksud dengan tim kampanye;
2. Dalam Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 belum menyebutkan yang dimaksud dengan Daerah Pemilihan Anggota DPD;
3. Dalam Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 ayat (36) tentang Situng
4. Perlu penambahan pasal diawal terkait asas penyelenggaraan Pemilu;
5. Perlu penambahan pasal di awal terkait prinsip Rekapitulasi Penghitungan Suara berdasarkan Prinsip;
6. Pasal 6 ayat (3) penambahan kata tersegel;
7. Pasal 9 penambahan klausul TPS
8. Pasal 13 perlu ditambahkan memastikan masing-masing kelompok minimal dipimpin 1 (satu) orang Anggota PPK
9. Pasal 22 penggantian klausul daerah/kelurahan/ desa menjadi kecamatan.
10. Pasal 28
11. Pasal 35 ayat (4) huruf f tentang saksi perlu ada pemisahan agar jelas
12. Pasal 71 ayat (1) huruf b.

### E. 4. Usulan, Masukan dan Perbaikan

Definisi Tim Kampanye dicantumkan dalam Ketentuan Umum Bab I Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2019. Perubahan dimaksud menjadi Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan calon bersama-sama dengan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye;

Difinisi Daerah Pemilihan Anggota DPD dicantumkan dalam Ketentuan Umum Bab I Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2019, perubahan dimaksud menjadi Daerah Pemilihan Anggota DPD adalah Provinsi yang ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan anggota DPD.

Situng seharusnya tertulis Sistem Informasi Perhitungan Perolehan Suara selanjutnya disebut Situng, menjadi Sistem Informasi Penghitungan Perolehan Suara yang selanjutnya



disebut Situng adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan penetapan hasil Pemilu.

Penambahan Pasal tentang asas Pemilu, menjadi Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan Asas Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil.

Penambahan Pasal tentang prinsip rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- Mandiri;
- Jujur;
- Langsung;
- Adil;
- Kepastian Hukum;
- Kepentingan Umum;
- Tertib;
- Terbuka;
- Proporsional;
- Profesional;
- Efektif;
- Efisien dan
- Aksesibilitas.

Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi tersegel, terjaga, aman dan utuh dengan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak rusak, tidak menghitung surat suara, dan tidak hilang.

Penambahan kata “TPS menjadi Panwaslu Kecamatan memastikan PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan membagi jumlah TPS di wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya dalam wilayah kerja PPS.

Dalam hal Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara dilaksanakan secara bersamaan, Panwaslu Kecamatan memastikan PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan membentuk paling banyak 4 (empat) kelompok dan memastikan masing-masing kelompok minimal dipimpin 1 (satu) orang Anggota PPK dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia

Mengganti Klausul Desa/Kelurahan menjadi Kecamatan, menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal rapat Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan membagi jumlah Kecamatan atau nama lainnya dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota

Perlu dilakukan penambahan ayat setelah ayat (4), menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan pada waktu yang sama terhadap keberatan yang diajukan saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)

Usulan Perubahan dimaksud, saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat pada saat rapat rekapitulasi dilaksanakan, yang ditandatangani oleh:

Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan

calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.

Pembetulan kata “yang”, menjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya.

Disamping diseminasi Peraturan Bawaslu di atas Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan bedah Peraturan Bawaslu dengan menyesuaikan situasi dan kondisi, yang dilakukan secara berkala, seperti Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelesaian sengketa proses pemilihan yang dilaksanakan pada hari Kamis 30 September 2021. Diskusi ini dihadiri langsung Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah, Heru Cahyono, S.SOS., MA, yang didampingi Sadhu Sudiyarto, SH, selaku Kepala bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, diantara hasil diskusi adalah Bawaslu Kabupaten temanggung agar melakukan sosialisasi tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa proses, melalui media daring yang dilakukan secara berkala berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tujuannya supaya masyarakat memahami penyelesaian sengketa proses di Bawaslu. Berikut ini merupakan data hasil diskusi peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung:

**TABEL 5.2****DATA DISKUSI PERATURAN BAWASLU**

No	Hari/Tanggal	Tempat	Materi Diskusi
	20 Januari 2020	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung	diskusi terkait Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
	18 April 2020	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung	Sosialisasi dan diskusi terkait Peraturan badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
	19 Mei 2020	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung	Sosialisasi dan diskusi terkait Peraturan badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
	3 Juni 2020	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung	Sosialisasi dan diskusi terkait Peraturan badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan

			<p>Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).</p> <p>dan Peraturan badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia.</p>
	11 September 2020	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung	<p>Sosialisasi dan diskusi terkait Peraturan badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Peraturan badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.</p>
	15 Oktober 2020	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung	<p>Sosialisasi dan diskusi terkait Peraturan badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif</p>
	20 November 2020	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung	<p>Sosialisasi dan diskusi terkait Peraturan badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis, Peraturan badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip dan Peraturan badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum. dan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2020 tentang</p>

			Jadwal Retensi Arsip.
	15 Desember 2020	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung	Diskusi terkait Peraturan Bawaslu Nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Bawaslu nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
	12 Juni 2021	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
	16 November 2021	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

#### **F. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan**

Dibawah ini disajikan data mengenai kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang telah diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui berbagai platform dan metode kepada masyarakat.

TABEL 5.3

## DATA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Hari/Tanggal	Sasaran	Peraturan Perundang-undangan Terkait
TAHUN 2018			
1	5 September 2018	Kapolres Temanggung dan Jajaran	Tugas dan Kewenangan Bawaslu Kab. Temanggung
2	5 September 2018	PJ.Bupati Temanggung dan jajaran	Tugas dan Kewenangan Bawaslu Kab. Temanggung
3	18 September 2018	Polres Temanggung	Tugas dan Kewenangan Bawaslu Kab. Temanggung Penanganan Pelanggaran Pidana
4	19 September 2018	Jajaran Polres Temanggung	Tugas dan Kewenangan Bawaslu Kab. Temanggung
5	24 September 2018	Panwaslu Kecamatan	Tugas dan Kewenangan Bawaslu Kab. Temanggung Pengawasan Pemilu Penanganan Pelanggaran Penyelesaian sengketa Pola Hubungan Anggota Pengawas
6	26 September 2018	Sekretariat Panwaslu Kecamatan	Kesekretariatan dan Keuangan
7	27 September 2018	Tokoh Masyarakat dan Pramuka	Pengawasan Pemilu Partisipatif, Pasal Pidana Pemilu
8	28 September 2018	Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Ormas	Pengawasan Pemilu Partisipatif, Pasal Pidana Pemilu
9	1 Oktober 2018	KPU Kab. Temanggung	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2019
10	1 Oktober 2018	Partai Politik dan Ormas	Pengawasan Pemilu, Pasal Pidana Pemilu
11	3 Oktober	Masyarakat Kecamatan	Pengawasan Pemilu Partisipatif

	2018	Selopampang dan Kecamatan Kandangan	
12	8 Oktober 2018	Komisi A. DPRD Provinsi Jawa Tengah	Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu dan Pilpres
13	21 November 2018	Partai Politik	Pengawasan Tahapan Pemilu 2019
14	22 November 2018	Ormas	Pengawasan Pemilu Partisipatif
15	23 November 2018	Stake Holders Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Temanggung	Tugas dan Kewenangan Bawaslu Kab. Temanggung  Hubungan antar lembaga Bawaslu
16	24 November 2018	Panwaslu Kecamatan	Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif
17	26 November 2018	Sekretariat Panwaslu Kecamatan	Kesekretariatan dan Keuangan
18	10 Desember 2018	Polres, Satpol PP, Dinas Perhubungan, KPU, DPU	Pengaturan Alat Peraga Kampaye Pemilu 2019
TAHUN 2019			
19	4 Januari 2019	Forum Jurnalis Temanggung dan Persatuan Wartawan Indonesia	Hubungan antar lembaga dan Kehumasan Bawaslu
20	11 Januari 2019	Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	Pengawasan Pemilu Partisipatif
21	12 Januari 2019	Komunitas Senam	Pengawasan Pemilu Partisipatif
22	22 – 25 Januari 2019	Pelajar SMA/MA/ SMK, dan santri Pondok Pesantren di wilayah Kab. Temanggung	Pengawasan Pemilu Partisipatif, Peran Pemilih Pemula dalam Pengawasan Partisipatif
23	27 Januari 2019	Pemilih Milenial	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

24	31 Januari 2019	Forum Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pengaturan Pengawasan Pemilu 2019
25	12 Februari 2019	Komisi A DPRD Kab. Temanggung	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Temanggung
26	23 Februari 2019	Komunitas Pedagang Pasar dan Kaki Lima	Peran Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif
27	25 Februari 2019	Partai Politik Peserta Pemilu	Tugas dan Kewenangan Saksi Peserta Pemilu
28	27 Februari 2019	Komunitas Sopir Angkot, Ojek dan Tukang Becak	Peran Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif, Pasal Pidana Politik Uang
29	28 Februari 2019	Komunitas Pecinta Mobil Carry	Peran Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif, Pasal Pidana Pemilu
30	1 Maret 2019	Pedagang Pasar Kliwon Temanggung	Peran Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif, Pasal Pidana Pemilu
31	2 Maret 2019	Pedagang Pasar Legi Parakan, Temanggung	Peran Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif, Pasal Pidana Pemilu
32	11 Maret 2019	KPU, Dinas Perhubungan, Polres, Satpol PP, Kodim, Dinas Perijinan	Pengaturan tentang tahapan kampanye melalui pemasangan alat peraga kampanye oleh peserta pemilu
33	15 Maret 2019	Camat, Kapolsek, Koramil, Ketua PPK dan Ketua Panwas Kecamatan	Pengawasan Tahapan Pemilu Tata cara dan prosedur penanganan pelanggaran
34	16 Maret 2019	Panwaslu Kecamatan	Pengawasan Tahapan Pemilu
35	19 Maret 2019	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tim kampanye Pemilu, tim kampanye Pilpres	Tugas, wewenang Bawaslu dan Pengawasan Tahapan Pemilu
36	20 Maret 2019	KPU dan Peserta Pemilu	Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu
37	27 Maret 2019	Panwaslu Kecamatan	Kode etik penyelenggara Pemilu



38	29 Maret 2019	Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Masyarakat	Peran Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif Tugas dan Kewenangan Bawaslu
39	31 Maret 2019	Pengunjung Car Free Day	Peran Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif
40	10 April 2019	Mitra Kerja Bawaslu	Pengawasan Tahapan Kampanye
41	11 April 2019	PPK dan Panwascam	Pengawasan tahapan pemungutan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara
42	22 April 2019	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Pengawasan tahapan pemungutan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara
<b>TAHUN 2020</b>			
43	Senin, 5/02/2020	Masyarakat Desa Glapansari	Tugas dan Kewenangan Bawaslu Kab. Temanggung  Pengawasan Pemilu  Peran Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif
44	Selasa s.d Rabu  18 s.d 19 / 02/2020	Semua Anggota dan Staff Bawaslu Kab. Temanggung	Peraturan Bawaslu terkait pola hubungan kerja
45	Selasa, 18/02/2020	Penikmat/Pendengar Radio (Radio Ofa FM)	Mengenalkan Lembaga Bawaslu Kab. Temanggung dan pemahaman terhadap demokrasi dan kepemiluan
46	Kamis, 27/02/2020	Mitra Kerja	Peran Mitra Kerja dalam Pengawasan Pemilu
47	09/04/2020	Masyarakat Kab Temanggung	Peringatan hari ulang tahun Bawaslu Ke-12, Bawaslu Kabupaten Temanggung Bangun Solidaritas Kebangsaan Lawan Covid 19 Dengan Adakan Donor Darah Dan Membagikan Masker & Handsanitizier Gratis
48	Kamis, 11/06/2020	Peserta SKPP	Peran SKPP dalam Pengawasan Partisipatif

49	26/09/2020	Pengguna Medsos	Iklan Layanan Masyarakat di masa pandemi
50	12/10/2020	Masyarakat Pengguna Medsos	Pengaturan tentang pelayanan informasi publik
51	Senin, 09/11/2020	Tokoh Masyarakat Desa Bandunggede	Pembinaan desa pengawasan dg tema "masyarakat bicara desa pengawasan"
52	Selas, 10/11/2020	SMK Mipha	Bincang pemilu dan demokrasi bareng pemilih pemula, peran pemilih pemula dalam pengawasan Pemilu
53	Senin, 16/11/2020	Tokoh Masyarakat Desa Wonotirto	Pembinaan desa Anti Politik Uang, Tata cara dan prosedur laporan pelanggaran Pemilu, Penanganan Pelanggaran Pemilu
54	Rabu, 02/12/2020	Tokoh Masyarakat Desa Rejosari	Pembinaan desa pengawasan dg tema "masyarakat bicara desa pengawasan"
TAHUN 2021			
55	08 Juni 2021	Tokoh Masyarakat Desa Gejagan Kecamatan Ngadirejo	Pengembangan Desa Anti Politik Uang Tahun 2021 (Desa Gejagan)  Peran Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif
56	24 Agustus 2021	Tokoh Masyarakat Desa Kalibanger Kecamatan Gemawang	Pengembangan Desa Pengawasan (Desa Kalibanger)  Peran Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif
57	02 September 2021	Tokoh Masyarakat Kelurahan Temanggung I, Kecamatan Temanggung	Pengembangan Desa Pengawasan (Kelurahan Temanggung I)  Peran Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif
58	07 September 2021	Tokoh Masyarakat Desa Keblukan, Kecamatan Kaloran	Pengembangan Desa Anti Politik Uang (Desa Keblukan)  Tata cara dan prosedur laporan pelanggaran Pemilu, Penanganan Pelanggaran Pemilu
59	08 September 2021	Pelajar SMA/SMK/MA Santri Pondok	Webinar "Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu"

		Pesantren dan Mahasiswa	Pengawasan Partisipatif
60	21 September 2021	Tokoh Masyarakat Desa Samiran, Kecamatan Kandangan	Pengembangan Desa Pengawasan (Desa Samiran) Peran Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif
61	05 Oktober 2021	Tokoh Masyarakat Desa Kertosari, Kecamatan Jumo	Pengembangan Desa Anti Politik Uang (Desa Kertosari) Tata cara dan prosedur laporan pelanggaran Pemilu, Penanganan Pelanggaran Pemilu
62	15 Oktober 2021	Tokoh Masyarakat Desa Purwosari, Kecamatan Wonobojo	Pengembangan Desa Pengawasan (Desa Purwosari) Peran Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif
63	28 Oktober 2021	Tokoh Masyarakat Desa Rejosari, Kecamatan Bansari	Tindak Lanjut Kampung Pengawasan (Desa Rejosari) Peran Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif
64	11 November 2021		Rakor Pengembangan Desa Pengawasan (Desa Tlogomulyo) Peran Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif

## **BAB VI**

### **CAPAIAN DATA DAN INFORMASI**

#### **A. Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi**

Pengelolaan data, Informasi dan dokumentasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Temanggung terus digalakkan. Berawal dari rapat kerja teknis Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Hari Rabu dan Kamis, tanggal 6-7 November 2019 di Fave Hotel Cilacap, Bawaslu Kabupaten Temanggung berkomitmen mengelola informasi publik yang transparan. Hal ini senada dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bawaslu sebagai badan publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi agar menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Era saat ini Informasi merupakan kebutuhan pokok dan hak bagi setiap warga negara. Oleh karena itu lembaga publik seperti Bawaslu juga harus mampu mewujudkan keterbukaan informasi tersebut.

Upaya yang tengah dilakukan dan dikembangkan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Temanggung ini adalah mengumpulkan semua data dan informasi mengenai hasil kinerja pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, keorganisasian, sumber daya manusia, keadministrasian serta keuangan.

Data dan informasi tersebut dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung sejak Tahun 2018, namun belum dilakukan digitalisasi dokumen. Baik yang berhubungan dengan Pengawasan Pilkada tahun 2018, Pengawasan Pemilu maupun Pengawasan Pilpres Tahun 2019. Data dan Dokumen ini sepenuhnya dikelola dan diklasifikasikan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang dinahkodai oleh Divisi Hukum, Data, Informasi dan Humas Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Sejak 31 Maret 2020 dengan SK Nomor: 01/Bawaslu-Prov.JT-27/HK.01.01/III/2020. PPID Bawaslu Kabupaten Temanggung bersifat tetap dan berkedudukan di Ibu kota Kabupaten Temanggung telah dibentuk dan ditetapkan PPID Bawaslu Kabupaten Temanggung, dengan melakukan digitalisasi dokumen.

Demi optimalnya pelayanan informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Temanggung, menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui surat keputusan nomor: 01/Bawaslu-Prov.JT-27/HK.01.01/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan struktur organisasi meliputi Pembina dijabat oleh Ketua, tim pertimbangan dijabat oleh anggota Bawaslu, atasan PPID dijabat oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung. Untuk memaksimalkan pelayanan dan update data informasi di Bawaslu Kabupaten Temanggung, struktur PPID juga mengikutsertakan petugas pelayanan informasi yang menerima permohonan informasi. Staff tersebut juga sebagai tim penghubung yang mengupdate seluruh data dan informasi.

Tahun 2019 website PPID masih tergabung dengan website utama namun perubahan dilakukan sejak tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Temanggung berusaha membangun sistem pelayanan informasi secara online melalui *website* PPID Bawaslu Kabupaten Temanggung yang terpisah beralamat di *link website*: <https://ppid.temanggung.bawaslu.go.id/> ,tujuanya untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi terkait hasil pengawasan pemilihan/pemilu.

Informasi yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung tahun 2021. Pada tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Temanggung telah memperbarui informasi publik di website PPID Bawaslu Kabupaten Temanggung, sesuai Perbawaslu 10 tahun 2019 pasal 10 ayat 2. Daftar Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Temanggung juga mengklasifikasikan jenis informasi berdasarkan muatannya yaitu informasi kelembagaan dan informasi kepemiluan yang ditetapkan kedalam SK Penetapan Daftar Informasi Publik nomor : 01/K.JT-27/HM.00/IV/2021.

Keseluruhan data dan informasi yang telah diupdate tahun 2021 di website PPID Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah sebanyak 161 dokumen dengan rincian sebagai berikut :

1. INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN BERKALA
  - a) Informasi Berkala Kelembagaan : 19 dokumen
  - b) Informasi Bekala Kepemiluan : 0 dokumen
2. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA
  - a) Informasi Serta Merta Kelembagan: 10 dokumen
  - b) Informasi Serta Merta Kepemiluan: 39 dokumen
3. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT: 50 dokumen.

## **B. Teknologi Komunikasi dan Informatika (TIK)**

Protokol kesehatan Covid-19 yang membatasi pertemuan tatap muka secara langsung, membuat masyarakat membatasi untuk bepergian keluar rumah.

Ketersediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi online menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin melakukan permohonan informasi tanpa harus keluar rumah dan kontak langsung dengan orang lain.

Beberapa layanan teknologi informasi dan komunikasi secara online yang tersedia di Bawaslu Kabupaten Temanggung antara lain, sebagai berikut :

1. Website

Bawaslu Kabupaten Temanggung memiliki 2 (dua) website utama sebagai penunjang keterbukaan informasi publik :

Website Utama yang mempublikasi hasil kinerja melalui berita aktual dan update dengan postingan berita pada tahun 2021 sebanyak: berita di alamat : <https://temanggung.bawaslu.go.id/>

Website PPID BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG yang memuat seluruh data dan informasi kepemiluan dan kelembagaan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan total data & informasi yang telah terupload tahun 2021 sebanyak 161 dokumen data dan informasi dengan alamat website di: <https://ppid.temanggung.bawaslu.go.id/>

#### 2. Telepon/Fax.

Sarana pelayanan informasi yang tersedia juga melalui telepon/fax di nomor telepon: (0293) 4961337. Pemohon informasi akan didata oleh petugas/staff pelayan informasi untuk dicatat ke dalam laporan pelayanan informasi.

#### 3. Email.

Publik juga dapat melakukan permohonan informasi melalui alamat email resmi lembaga, yang terdiri dari :

[panwaskabtemanggung27@gmail.com](mailto:panwaskabtemanggung27@gmail.com).

menjadi

[set.temanggung@bawaslu.go.id](mailto:set.temanggung@bawaslu.go.id)

Seluruh permohonan informasi melalui sarana dan prasarana yang disediakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Temanggung akan dilayani oleh petugas pelayanan PPID Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagai komitmen keterbukaan informasi untuk masyarakat.

#### 4. Media Sosial

Selain melalui sarana pelayanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Temanggung juga aktif menyampaikan informasi publik melalui berbagai platform media sosial. Berikut data terkait akun media sosial yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Temanggung:

NO	MEDIA SOSIAL	ALAMAT MEDSOS
1.	FACEBOOK	Bawaslu Kabupaten Temanggung
2.	INSTAGRAM	bawaslukabupatentemanggung
3.	TWITTER	@Bawaslukabtmg
4.	YOUTUBE	Humas Bawaslu Kabupaten Temanggung

Penggunaan Aplikasi dan/atau Sistem Informasi Lainnya.

## 5. Sistem Android

Sejak tahun 2020, PPID Bawaslu Kabupaten Temanggung membuat inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi publik.

Melalui aplikasi android PPID Bawaslu Kabupaten Temanggung, masyarakat dapat langsung mengakses informasi yang tersedia di website PPID Bawaslu Kabupaten Temanggung baik informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat.



## 6. Buletin Suara Bawaslu

Selain beberapa media yang disebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Temanggung juga memiliki media cetak keterbukaan informasi yaitu Buletin.

Hasil kerja Bawaslu Kabupaten Temanggung dituangkan dalam bentuk narasi dan dicetak dalam bentuk buletin Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Buletin tidak hanya dibaca oleh kalangan internal Bawaslu Kabupaten Temanggung saja, tetapi juga didistribusikan kepada instansi dan SKPD di Kabupaten Temanggung. Hingga akhir tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Temanggung telah menerbitkan 4 edisi Buletin sebagai bentuk komitmen keterbukaan informasi publik yang ramah, mudah dan murah.



## **BAB VII**

### **PENGHARGAAN YANG DIRAIH**

Bawaslu Kabupaten Temanggung belum pernah mendapatkan penghargaan yang berkaitan dengan data dan informasi.

Namun Monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2021, hasilnya cukup menggembirakan, karena PPID Bawaslu Kabupaten Temanggung menempati ranking 15 (lima belas) dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/ Kota, hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Temanggung menuju informative. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan 2 (dua) ranking jika dibandingkan dengan monitoring dan evaluasi tahun 2020.



## BAB VIII

# RENCANA KERJA HUKUM, HUMAS DAN DATIN TAHUN 2022

Beberapa program kerja yang direncanakan Bawaslu Kabupaten Temanggung di tahun 2022 antara lain:

1. Digitalisasi data dan informasi supaya dokumen dan data yang ada tidak mudah hilang begitu saja karena tidak ada versi digitalnya;
2. Penyempurnaan aplikasi pelayanan PPID perlu dilanjutkan dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi;
3. Diseminasi mengenai keterbukaan informasi publik pada unit teknis (unit pemilik informasi), sehingga memiliki pemahaman yang sama dengan PPID Bawaslu Kabupaten Temanggung dan Perangkat PPID Bawaslu Kabupaten Temanggung;
4. Diseminasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan peraturan Bawaslu, Peraturan KPU maupun peraturan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan lembaga.
5. Diskusi dan Bedah Peraturan Perundang-undangan secara berkala.
6. Penyusunan materi dasar keterbukaan informasi publik dan implementasinya di Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam berbagai bentuk media komunikasi, sehingga dapat dijadikan panduan bagi seluruh pegawai dan staff Bawaslu Kabupaten Temanggung;
7. Standarisasi materi keterbukaan informasi Publik yang di sampaikan pada saat rapat koordinasi Kehumasan;
8. Pembahasan rencana pembuatan basis data base yang terintegrasi dengan semua link yang terhubung semua pejabat pengelola PPID yang berisi data statistik yang dapat diakses oleh Publik.
9. Membangun kerja sama dengan mitra kerja baik pers maupun media lainya untuk meningkatkan pelayanan informasi.

Berikut ini merupakan rencana kerja Divisi tahun 2022 :

No	Rencana Kegiatan Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2022	Divisi
1	Fasilitasi Pengelolaan Layanan Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Hukum
2	Sosialisasi Peraturan dan Non Peraturan Bawaslu Kabupaten/Kota (PN)	Hukum
3	Pelatihan Penulisan Berita dan Video	Humas Datin
4	Penerbitan Buku Sejarah Bawaslu Kab/Kota	Humas Datin
5	Penerbitan Buletin	Humas Datin
6	Rapat dengan Media dan Stakeholder	Humas Datin
7	Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota	Humas Datin
8	Peliputan/Pembuatan Film Dokumenter Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (PN)	Humas Datin

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Laporan Hukum, Humas data dan informasi tahun 2021 telah disajikan secara komprehensif, memuat semua aktifitas kinerja yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021.

Dari ranah laporan kinerja hukum lebih pada kegiatan inventarisir permasalahan dan pemetaan penyusunan peraturan Bawaslu, serta sosialisasi produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Dari ranah laporan kinerja Kehumasan memuat berbagai aspek terkait kinerja publikasi dan jalinan kerja sama dengan stake holder diantaranya adalah perkembangan media publikasi yang dilaksanakan melalui berbagai platform dan metode.

Dari ranah laporan kinerja data dan informasi memuat digitalisasi dokumen menuju pelayanan informasi public yang prima dan transparan.

Tentunya masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan tahunan ini, permohonan maaf kami haturkan kepada para pimpinan. Kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan pada masa yang akan datang.

## Lampiran

### 1. Peningkatan Kapasitas yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI



*Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Tahun 2019 Gelombang V di Hotel Royal Kuningan pada tanggal 26 s.d 28 Februari 2019*

### 2. Peningkatan Kapasitas yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah



*Rapat Kerja Teknis Dengan Kabupaten/Kota "Penerbitan Buku Hasil Kinerja dan Prestasi Bawaslu di Jawa Tengah", di Hotel San Q Ta Guci Tegal pada tanggal 14 s.d 16 Agustus 2019*

3. Peningkatan Kapasitas yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung



Peningkatan Kapasitas SDM Bawaslu Kabupaten Temanggung di Kebumen pada tanggal 2 s.d 3 Oktober 2019

4. Sarana dan Prasarana Kehumasan



5. Buletin Suara Bawaslu Kabupaten Temanggung Edisi I, II, III, IV



Edisi I



Edisi II



Edisi III



Edisi IV

6. Solutif Bawaslu Kabupaten Temanggung



Solutif Sengketa bersama Bapak Heru Cahyono, S.Sos., M.A



Webinar Pojok Pengawasan dengan Narsum Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum dan Agus Sujarwo, AP., M.M



Solutif Kehumasan tentang Peranan SDM di Bawaslu

## 7. Rapat Koordinasi Internal



Rapat Internal Pembahasan tentang Regulasi Peraturan



Rapat Internal Pembahasan tentang Kehumasan

## 8. Link Konten

No	Sosial Media	Link
1	Email	set.temanggung@bawaslu.go.id
2	Website Utama	<a href="https://temanggung.bawaslu.go.id/">https://temanggung.bawaslu.go.id/</a>
3	Website PPID	<a href="https://ppid.temanggung.bawaslu.go.id/">https://ppid.temanggung.bawaslu.go.id/</a>
4	PPID Berbasis Android	<a href="https://drive.google.com/file/d/1InqXbsyQILSibVWqC8QoK3SDnmGv1fd/view">https://drive.google.com/file/d/1InqXbsyQILSibVWqC8QoK3SDnmGv1fd/view</a>
5	Instagram	<a href="https://www.instagram.com/bawaslukabupatentemanggung/">https://www.instagram.com/bawaslukabupatentemanggung/</a>
6	Facebook	<a href="https://www.facebook.com/Bawaslu.temanggung.37">https://www.facebook.com/Bawaslu.temanggung.37</a>
7	Twitter	<a href="https://twitter.com/Bawaslukabtmg">https://twitter.com/Bawaslukabtmg</a>
8	Youtube	<a href="https://www.youtube.com/channel/UCEC_ZdcaP8SjSt3EgYwsbOg">https://www.youtube.com/channel/UCEC_ZdcaP8SjSt3EgYwsbOg</a>